

LAPORAN KEUANGAN (Catatan Atas Laporan Keuangan) TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan (CALK) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan perlu menyusun Laporan Keuangan dan disampaikan kepada Bupati Tanah Laut.

Laporan Keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kkerja keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi keuangan yang ditetapkan dalam dokumen anggaran belanja dan pendapatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan perdagangan Tahun 2023.

Laporan ini menyajikan realisasi belanja dan pendapatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Dengan Laporan Keuangan ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Pelaihari, 24 Januari 2024

Kepala Dinas,



Drs. H. Syahrial Nurdin, M.Si
NIP. 19641112 198503 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan.....

1.1 Maksud dan Tujuan.....

1.2 Landasan Hukum.....

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....

BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah.....

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.....

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target.....

BAB III Penjelasan Pos – pos laporan Keuangan

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing – masing pos- pos

3.2 Pengukuran atas pos – pos aset dan kewajiban yang timbul.....

BAB IV Penjelasan atas informasi Non Keuangan.....

BAB IV Penutup.....

Lampiran – Lampiran.....

BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 Km² atau 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 Km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 127,00 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebanyak 350.007 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 106,4 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sebesar 889 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 307 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 301 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2023 adalah sebanyak 67,97 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 72,27% dan 3,52% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 48,82% disusul sektor perdagangan sebesar 19,54% dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan yang mencapai 13,05%.

SUMBER DAYA LAHAN

Tahun 2023 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan kering menurut jenis penggunaannya seluas 24.175 Ha serta bukan tanah seluas 47.351 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 20.014 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2023 mencapai 12.622 ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2023 sebesar 14.894.

SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah sebesar 127.101,73 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.849,98 Ha, kawasan hutan produksi 85.802,01 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.449,74 Ha. Kawasan hutan lindung

yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.719,88 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.053,28 Ha.

SUMBER DAYA AIR

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2023 berkisar antara 33,4°C sampai 34,7°C, temperatur minimum berkisar antara 21,1°C sampai 22,9°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,9°C sampai 29,0°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 113,6 mm sampai 407,3 mm dengan jumlah hari hujan antara 12 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juli hingga September, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan Oktober hingga Juni, meskipun beberapa waktu kebelakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

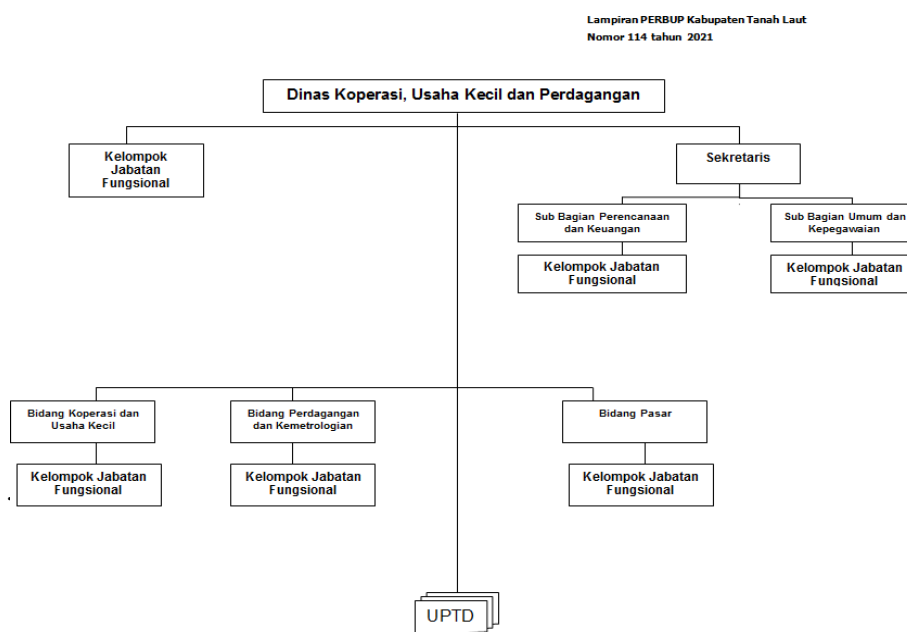
SUMBER DAYA MINERAL

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

STRUKTUR ORGANISASI

Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada Tahun 2010 juga telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dan perubahan terakhir struktur Organisasi dan tata kerja yaitu nomor 114 Tahun 2021 tentang SOTK Perangkat daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah :

SOTK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan



BAB II

2.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
-

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

2.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-

- 20) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMRINTAH DAERAH

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	3.1.1 Pendapatan-LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan-LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB V	Penutup

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 2.000.000.000,- dan anggaran belanja sebesar Rp 12.313.859.849,- sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 10.313.859.849,-

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 1.900.000.000,- dan anggaran belanja sebesar Rp. 12.652.709.687,- sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 10.752.709.687,-

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.706.061.750,- dan belanja sebesar Rp. 11.201.443.192,- serta belanja transfer sebesar Rp.0,- sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp.0,-

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp. (10.752.709.687) ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp.(9.495.381.442,00), maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2023 posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (14.571.564.197,00)

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya diatas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2023 mencapai 88,53 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana

pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

4.1 RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun 2023 sebesar Rp.1.706.061.750,- dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp 1.900.000,- atau realisasi sebesar 89,79 %. Pendapatan Asli Daerah-LRA ini mengalami penurunan sebesar Rp.39.368.250,- atau sebesar 2,31% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2022 sebesar Rp. 1.745.430.000,-

4.1.1.1.1 RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.900.000.000,00	1.706.061.750,00	1.745.430.000,00

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.706.061.750,- dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.745.430.000,- Pendapatan Retribusi Daerah di Diskopdag yaitu : Retribusi Jasa Umum. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2023 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	199.700.000,-	194.574.000,-	97,43	259.140.000,-	-33,18%
2	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	535.920.000,-	354.785.000,-	66,20	397.471.000,-	-12,03%
3	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	803.580.000,-	795.140.000,-	98,95	735.367.000,-	7,52%
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,-	10.800.000,-	100,00	25.570.000,-	-136,76%
5	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	350.000.000,-	350.762.750,-	100,22	312.903.000,-	10,79%
	Jumlah					

Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.1.706.061.750,- Pendapatan retribusi daerah di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.39.368.250,- atau -2,31% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Retribusi Pelayanan Pasar-Kios.

4.1.1.2 BELANJA OPERASI

Belanja operasi untuk tahun anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.757.366.413,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.835.469.189,00 Belanja Hibah sebesar Rp.0,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.214.826.555,00 atau sebesar -66,32% dari tahun sebelumnya.

4.1.1.2.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
4.757.366.413,00	4.391.902.525,00	4.255.998.111,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 4.391.902.525,00 dan Rp.4.255.998.111,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.187.044.840,00	2.118.807.735,00	96,88	1.931.344.207,00	8,85 %
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.570.321.573,00	2.273.094.790,00	88,44	2.324.653.904,00	-2,27%
	Jumlah	4.757.366.413,00	4.391.902.525,00	92,32	4.255.998.111,00	3,09%

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 135.904.414,00 atau sebesar 3,09 % dari tahun sebelumnya.

4.1.1.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
5.835.469.189,00	4.979.446.867,00	4.493.277.836,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp.4.979.446.867,00 dan Rp.4.493.277.836,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Belanja Barang dan Jasa

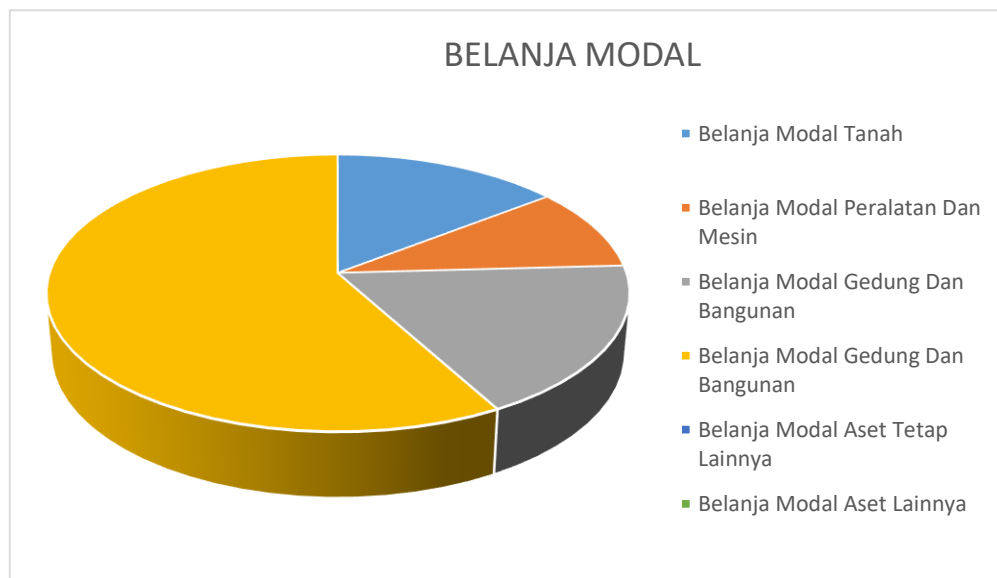
No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.147.973	674.120.931,00	61,28	610.352.790,00	
2	Belanja Jasa Kantor	2.795.574.302	2.639.493.567,00	94,42	2.595.372.369,00	1,67
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	170.056.044	153.518.202,00	90,28	144.775.799,00	5,69
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	209.609.370	199.505.800,00	95,18	92.915.000,00	53,43

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	141.950.000	141.950.000,00	100,00	209.652.000,00	-47,69
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	314.062.500	267.273.270,00	85,10	150.511.660,00	43,69
7	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	21.237.000,00	0,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.104.069.000	903.585.097,00	81,84	668.461.218,00	26,02
9	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
10	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	0,00	0,00	6.336.900.000,00	0,00
	Jumlah	5.835.469.189	4.979.446.867,00	85,33	4.493.277.836,00	9,76

4.1.1.3 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk tahun 2023 terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.265.582.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 176.102.300,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.326.521.500,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.1.061.888.000,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00.

Grafik 1 Realisasi Belanja Modal 2023



4.1.1.3.1 BELANJA MODAL TANAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
323.726.000,00	265.582.000,00	12.490.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp.265.582.000,00 dan Rp.12.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	323.726.000,-	265.582.000,-	82,04	12.490.000,-	95,30%
	Jumlah					

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.253.092.000,00 atau sebesar 95,30% dari tahun sebelumnya.

4.1.1.3.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
237.305.085,00	176.102.300,00	165.655.750,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp.176.102.300,00 dan Rp. 165.655.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	600.000,00	00,0%
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0,00	0,00	155.900.000,00	00,0%
3	Belanja Modal Alat Kantor	6.918.974	6.090.000,00	88,02	0,00	100%
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	108.177.287	82.439.800,00	76,21	9.155.750,00	88,89%
5	Belanja Modal Alat Studio	47.349.270	25.882.500,00	54,66	0,00	100%
6	Belanja Modal Peralatan Pemancar	43.290.000	31.500.000,00	72,77	0,00	100%
7	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.828.501	3.300.000,00	86,20	0,00	100%
8	Belanja Modal Komputer Unit	24.966.053	24.190.000,00	96,89	0,00	100%
9	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.775.000	2.700.000,00	97,30	0,00	100%
	Jumlah	237.305.085	176.102.300,00	74,21	165.655.750,00	5,93%

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.446.550,00 atau sebesar 5,93% dari tahun sebelumnya.

4.1.1.3.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>363.740.000,00</u>	<u>326.521.500,00</u>	<u>506.596.500,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp.326.521.500,00 dan Rp.506.596.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	363.740.000	326.521.500	89,77	506.596.500	-55,15%
	Jumlah	363.740.000	326.521.500	89,77	506.596.500	-55,15%

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Diskopdag pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 180.075.000,00 atau sebesar -55,15% dari tahun sebelumnya.

4.1.1.3.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>1.135.103.000,00</u>	<u>1.061.888.000,00</u>	<u>46.076.000,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.061.888.000,00 dan Rp.46.076.000,00 terdiri atas:

Tabel 7 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Jalan	281.829.000	277.883.000	98,60	14.940.000,00	94,62%
2	Belanja Modal Jembatan	18.870.000	18.308.000	97,02	0,00	1%
3	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	245.804.000	223.367.000	90,87	11.210.100,00	94,98%
4	Belanja Modal Jaringan Listrik	588.600.000	542.330.000	92,14	19.925.900,00	96,33%
	Jumlah	1.135.103.000	1.061.888.000	93,55	46.076.000	95,66%

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.015.812.000,00 atau sebesar 95,66% dari tahun sebelumnya.

4.1.2 NERACA

4.1.2.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.1.2.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.1.2.3 PIUTANG

Piutang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Lainnya. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Piutang Retribusi Parkir Pasar	0,00	31.630.500,00	0,00	00,00
2	Piutang Retribusi Pasar	569.760.100,00	200.336.500,00	369.423.600,00	54,23
	Jumlah	569.760.100,-	231.967.000,00	369.423.600,00	62,79

Penjelasan atas masing-masing piutang tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.2.3.1 PIUTANG RETRIBUSI

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
369.423.600,00	200.336.500,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan atas retribusi daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 369.423.600,00 dan Rp. 200.336.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Piutang Retribusi Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Piutang Retribusi Parkir Pasar	0,00	31.630.500,00	0,00	00,00
2	Piutang Retribusi Pasar	569.760.100,00	200.336.500,00	369.423.600,00	54,23
	Jumlah	569.760.100,-	231.967.000,00	369.423.600,00	62,79

4.1.2.3.2 PENYISIHAN PIUTANG

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(324.223.475,00)	(324.223.475,00)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(324.223.475,00/ dan sebesar Rp.(324.223.475,00). Sesuai neraca pada aplikasi Fmis, masih proses perhitungan.

4.1.2.4 PERSEDIAAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>365.000,00</u>	<u>464.000,00</u>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.365.000,00 dan Rp. 464.000,00. Saldo Persediaan Diskopdag pada Tahun Anggaran 2022 Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari APBD per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 99.000,00 atau sebesar 27,12 % Untuk rincian masing-masing sumber yang tercatat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Odner	105.000,00			
2	Tipe X	13.000,00			
3	Binder Clip	8.000,00			
4	Map kertas	34.000,00			
5	Kertas HPS F4	134.000,00			
6	Amplop Kop	45.000,00			
7	Bak stempel Hero	26.000,00			
	Jumlah	365.000,00	464.000,00	99.000,00	27,12

DATA SESUAI BERITA ACARA PENGURUS BARANG

4.1.2.5 ASET TETAP

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>39.581.111.072,83</u>	<u>37.742.643.522,83</u>

Saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.....,00 dan Rp.....,00terdiri atas:

Tabel 11 Rincian Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.	Tanah	6.520.445.610,00	6.245.081.060,00	
2.	Peralatan dan Mesin	5.760.329.626,00	5.575.853.576,00	
3.	Gedung dan Bangunan	39.161.275.309,91	38.834.753.809,91	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.570.631.758,57	4.518.526.308,57	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	156.566.000,00	156.566.000,00	
7.	Akumulasi Penyusutan	(17.588.137.231,65)	(17.588.137.231,65)	
	Jumlah			

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

4.1.2.5.1 ASET TETAP LAINNYA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
40.092.596.524,83	38.254.592.974,83

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 40.092.596.524,83 dan sebesar Rp. 38.254.592.974,83 Realisasi Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.183.800.000,00 atau sebesar 4,58 % dari tahun sebelumnya. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

4.1.2.6 ASET LAINNYA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
124.501.427,00	124.501.427,00

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.124.501.427,00 dan Rp. 124.501.427,00 terdiri atas:

Tabel 12 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Tak Berwujud	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	307.774.666,00	307.774.666,00	0,00
3	Aset Lain-lain	(25.380.000,00)	(25.380.000,00)	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(213.943.239,00)	(213.943.239,00)	0,00
Jumlah		124.501.427,00	124.501.427,00	0,00

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

4.1.2.6.1 ASET LAIN-LAIN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
307.774.666,00	307.774.666,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 307.774.666,00 dan Rp. 307.774.666,00 Realisasi Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 tidak berubah dari tahun sebelumnya.

4.1.2.6.2 UTANG BEBAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
.....,00	4.837.622,00

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.....,00 dan Rp. 4.837.622,00 Utang beban barang dan jasa yang berasal dari jasa listrik sebesar Rp.....tahun 2023, yang telah dibayarkan semua pada triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Tabel 13 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Jasa listrik		4.837.622,00		
	Jumlah				

4.1.2.7 EKUITAS

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
38.249.755.352,83	38.249.755.352,83

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 38.249.755.352,83 dan Rp. 38.249.755.352,83 Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 38.249.755.352,83 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2022
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
Surplus/defisit Operasional
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023

4.1.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.1.3.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 14 Pendapatan LO

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.706.061.750,00	2.063.746.500,00	(357.684.750,00)	-17,33
	Jumlah	1.706.061.750,00	2.063.746.500,00	(357.684.750,00)	-17,33

4.1.3.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp.....,00 dan Rp.....,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pegawai	4.201.393.953,00	4.254.841.411,00	(53.447.458,00)	-1,26
2	Persediaan	666.211.181,00	609.779.790,00	56.431.391,00	9,25
3	Jasa	3.129.629.947,00	3.047.240.556,00	82.389.391,00	2,70
4	Pemeliharaan	267.273.270,00	168.248.660,00	99.024.610,00	58,86
5	Perjalanan Dinas	903.585.097,00	673.753.218,00	229.831.879,00	34,11
6	Hibah	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	-100,00
7	Bantuan Sosial	0,00	6.282.900.000,00	(6.282.900.000,00)	-100,00
8	Penyusutan dan Amortisasi	0,00	71.696.945,00	(71.696.945,00)	-100,00
9	Penyisihan Piutang	0,00	1.282.329.556,00	(1.282.329.556,00)	-100,00
	Jumlah	9.168.093.448,00	16.890.790.136,00	(7.722.696.688,00)	-45,72

Realisasi Beban Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(7.722.696.688,00) atau sebesar -45,72% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

4.1.3.3 DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.0,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(1.578.939.422,00) Rincian Beban Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Beban Defisit Non Operasional

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	1.578.939.422,00	(1.578.939.422,00)	-100,00
	Jumlah	0,00	1.578.939.422,00	(1.578.939.422,00)	-100,00

Realisasi Beban Defisit Non Operasional Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp(1.578.939.422,00) atau -100,00% dari tahun sebelumnya.

4.1.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 38.249.755.352,83 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2022 sebesar Rp. 39.735.860.697,83 ditambah Surplus LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. (7.462.031.698,00) ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. (16.405.983.058,00)

4.1.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 38.249.755.352,83. Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022.Rp. 39.735.860.697,83

4.1.4.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2023

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(7.462.031.698,00) berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2022. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

5.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

5.1.1 BANJIR

5.1.2 GEMPA

BAB VI

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp.1.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.706.061.750,00 atau 89,79%. Belanja dianggarkan sebesar Rp. 12.652.709.687,00 yang terealisasi sebesar Rp. 11.201.443.192,00 atau 88,53%. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LK SKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Kepala Dinas,



Drs. H. Syarifuddin Nurdin, M.Si
NIP. 196411121985031015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-17.3-30.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
Unit : 2-17.3-30.0-00.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
Sub Unit : 2-17.3-30.0-00.01.000.0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Retribusi	711.207.500,00	711.207.500,00
Penyisihan Piutang	(324.223.475,00)	(324.223.475,00)
Persediaan	0,00	464.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	386.984.025,00	387.448.025,00
ASET TETAP		
Tanah	6.520.445.610,00	6.245.081.060,00
Peralatan dan Mesin	5.760.329.626,00	5.575.853.576,00
Gedung dan Bangunan	39.161.275.309,91	38.834.753.809,91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.570.631.758,57	4.518.526.308,57
Konstruksi Dalam Pengerjaan	156.566.000,00	156.566.000,00
Akumulasi Penyusutan	(17.588.137.231,65)	(17.588.137.231,65)
JUMLAH ASET TETAP	39.581.111.072,83	37.742.643.522,83
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	56.050.000,00	56.050.000,00
Aset Lain-lain	307.774.666,00	307.774.666,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(25.380.000,00)	(25.380.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(213.943.239,00)	(213.943.239,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	124.501.427,00	124.501.427,00
JUMLAH ASET	40.092.596.524,83	38.254.592.974,83
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	4.837.622,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	4.837.622,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	4.837.622,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	38.249.755.352,83	38.249.755.352,83
JUMLAH EKUITAS	38.249.755.352,83	38.249.755.352,83
JUMLAH EKUITAS	38.249.755.352,83	38.249.755.352,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38.249.755.352,83	38.254.592.974,83





PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.900.000.000	1.706.061.750,00	89,79	1.745.430.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.900.000.000	1.706.061.750,00	89,79	1.737.940.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.900.000.000	1.706.061.750,00	89,79	1.730.451.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.539.200.000	1.344.499.000,00	87,35	1.391.978.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	199.700.000	194.574.000,00	97,43	259.140.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	535.920.000	354.785.000,00	66,20	397.471.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	803.580.000	795.140.000,00	98,95	735.367.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000	10.800.000,00	100,00	25.570.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000	10.800.000,00	100,00	25.570.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	350.000.000	350.762.750,00	100,22	312.903.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	350.000.000	350.762.750,00	100,22	312.903.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0	0,00	0,00	7.489.500,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0	0,00	0,00	7.489.500,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0	0,00	0,00	7.489.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	0,00	0,00	7.489.500,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0,00	0,00	7.489.500,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0	0,00	0,00	7.489.500,00
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0	0,00	0,00	7.489.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.900.000.000	1.706.061.750,00	89,79	1.745.430.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.900.000.000	1.706.061.750,00	89,79	1.745.430.000,00
5	BELANJA DAERAH	12.652.709.687	11.201.443.192,00	88,53	16.316.994.197,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.592.835.602	9.371.349.392,00	88,47	15.586.175.947,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.757.366.413	4.391.902.525,00	92,32	4.255.998.111,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.187.044.840	2.118.807.735,00	96,88	1.931.344.207,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.380.271.311	1.359.730.860,00	98,51	1.342.989.958,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.368.616.311	1.359.730.860,00	99,35	1.342.989.958,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	11.655.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	147.435.272	139.211.152,00	94,42	129.418.015,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	144.935.272	139.211.152,00	96,05	129.418.015,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	102.710.000	102.270.000,00	99,57	102.270.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102.710.000	102.270.000,00	99,57	102.270.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	98.100.000	92.720.000,00	94,52	85.480.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	95.600.000	92.720.000,00	96,99	85.480.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.820.000	34.335.000,00	95,85	39.620.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.820.000	34.335.000,00	95,85	39.620.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	94.838.160	88.497.240,00	93,31	84.296.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	91.838.160	88.497.240,00	96,36	84.296.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	176.517.258	173.517.258,00	98,30	7.818.916,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	173.517.258	173.517.258,00	100,00	7.818.916,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62.612	16.581,00	26,48	17.897,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.612	16.581,00	28,78	17.897,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	134.659.056	117.327.297,00	87,13	128.321.972,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	131.159.056	117.327.297,00	89,45	128.321.972,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.269.543	2.795.607,00	53,05	2.782.103,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.769.543	2.795.607,00	74,16	2.782.103,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.361.628	8.386.740,00	80,94	8.328.466,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.861.628	8.386.740,00	94,64	8.328.466,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.570.321.573	2.273.094.790,00	88,44	2.324.653.904,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.982.948.211	1.716.549.914,00	86,57	2.324.653.904,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.974.948.211	1.716.549.914,00	86,92	2.324.653.904,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	529.487.223	519.513.730,00	98,12	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	524.487.223	519.513.730,00	99,05	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	5.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	57.886.139	37.031.146,00	63,97	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	52.886.139	37.031.146,00	70,02	0,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	5.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.835.469.189	4.979.446.867,00	85,33	4.493.277.836,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.100.147.973	674.120.931,00	61,28	610.352.790,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.147.973	674.120.931,00	61,28	610.352.790,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	142.121.615	99.577.197,00	70,06	12.616.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	0,00	0,00	2.842.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.285.600	14.939.950,00	67,04	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	147.000.000	52.000.000,00	35,37	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	236.595.871	92.373.120,00	39,04	134.677.918,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.738.977	28.387.228,00	77,27	14.512.422,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000	3.540.000,00	75,32	1.290.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34.260.953	24.433.272,00	71,32	14.117.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.439.877	21.070.664,00	76,79	20.042.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.592.413	58.742.000,00	58,40	64.815.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.550.000	5.000.000,00	90,09	12.600.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	0,00	0,00	10.842.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.330.000	5.000.000,00	78,99	14.299.728,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.648.131	9.388.000,00	88,17	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.120.000	3.800.000,00	62,09	26.969.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.748.556	12.500.000,00	42,02	18.589.522,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.469.750	2.187.500,00	88,57	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.005.730	957.000,00	95,15	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.915.000	50.070.000,00	63,45	60.975.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	177.045.000	163.355.000,00	92,27	199.165.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.548.000	6.800.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.032.500	20.000.000,00	86,83	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.317.189.716	3.134.467.569,00	94,49	3.042.715.168,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.795.574.302	2.639.493.567,00	94,42	2.595.372.369,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	79.600.000	76.050.000,00	95,54	78.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.370.000	32.570.000,00	89,55	3.060.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	64.800.000	64.800.000,00	100,00	52.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.050.000	450.000,00	42,86	600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	89.600.000	64.600.000,00	72,10	614.525.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.143.200.000	2.092.100.000,00	97,62	1.601.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.600.000	7.450.000,00	38,01	21.700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	67.350.000	67.350.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	68.400.000	68.400.000,00	100,00	68.400.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.000.000	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	17.886.000	17.600.000,00	98,40	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	59.430.000	59.430.000,00	100,00	65.800.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	4.750.000	4.750.000,00	100,00	4.425.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	128.538.302	71.693.567,00	55,78	56.912.369,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000	2.750.000,00	91,67	2.850.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	170.056.044	153.518.202,00	90,28	144.775.799,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	149.688.000	141.623.622,00	94,61	133.931.520,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.052.464	5.286.480,00	58,40	4.825.146,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.315.580	6.608.100,00	58,40	6.019.133,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	209.609.370	199.505.800,00	95,18	92.915.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000	14.370.000,00	79,83	23.550.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	800.000	800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	101.068.570	100.000.000,00	98,94	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	52.340.800	51.435.800,00	98,27	37.765.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.400.000	17.900.000,00	79,91	16.600.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	15.000.000	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	141.950.000	141.950.000,00	100,00	209.652.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	111.950.000	111.950.000,00	100,00	185.377.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000	30.000.000,00	100,00	275.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	314.062.500	267.273.270,00	85,10	171.748.660,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	314.062.500	267.273.270,00	85,10	150.511.660,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	187.100.000	170.513.350,00	91,13	59.915.100,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	72.000.000	68.453.750,00	95,07	69.904.250,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.000.000	12.162.070,00	36,85	12.524.060,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000	4.499.100,00	74,99	4.483.250,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.620.000	1.815.000,00	39,29	3.685.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.347.500	5.330.000,00	83,97	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.995.000	4.500.000,00	90,09	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	21.237.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0,00	0,00	21.237.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.104.069.000	903.585.097,00	81,84	668.461.218,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.104.069.000	903.585.097,00	81,84	668.461.218,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	608.599.000	479.113.637,00	78,72	254.685.394,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	495.470.000	424.471.460,00	85,67	413.775.824,00
5.1.05	Belanja Hibah	0	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	6.336.900.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0,00	0,00	6.336.900.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	0,00	0,00	6.336.900.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0	0,00	0,00	6.336.900.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.592.835.602	9.371.349.392,00	88,47	15.586.175.947,00
5.2	BELANJA MODAL	2.059.874.085	1.830.093.800,00	88,84	730.818.250,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	323.726.000	265.582.000,00	82,04	12.490.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	323.726.000	265.582.000,00	82,04	12.490.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	323.726.000	265.582.000,00	82,04	12.490.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	323.726.000	265.582.000,00	82,04	12.490.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.305.085	176.102.300,00	74,21	165.655.750,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	155.900.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0,00	0,00	155.900.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0	0,00	0,00	155.900.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	115.096.261	88.529.800,00	76,92	9.155.750,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.918.974	6.090.000,00	88,02	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.918.974	6.090.000,00	88,02	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	108.177.287	82.439.800,00	76,21	9.155.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	85.619.667	72.800.800,00	85,03	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.510.120	7.000.000,00	48,24	4.516.750,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.047.500	2.639.000,00	32,79	4.639.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	90.639.270	57.382.500,00	63,31	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	47.349.270	25.882.500,00	54,66	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	47.349.270	25.882.500,00	54,66	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	43.290.000	31.500.000,00	72,77	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	43.290.000	31.500.000,00	72,77	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.828.501	3.300.000,00	86,20	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.828.501	3.300.000,00	86,20	0,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	3.828.501	3.300.000,00	86,20	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.741.053	26.890.000,00	96,93	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.966.053	24.190.000,00	96,89	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.966.053	24.190.000,00	96,89	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.775.000	2.700.000,00	97,30	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.775.000	2.700.000,00	97,30	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	363.740.000	326.521.500,00	89,77	506.596.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	363.740.000	326.521.500,00	89,77	506.596.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	363.740.000	326.521.500,00	89,77	506.596.500,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0	0,00	0,00	117.374.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0,00	0,00	177.185.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	18.870.000	18.202.000,00	96,46	122.371.500,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	344.870.000	308.319.500,00	89,40	89.666.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.135.103.000	1.061.888.000,00	93,55	46.076.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	300.699.000	296.191.000,00	98,50	14.940.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	281.829.000	277.883.000,00	98,60	14.940.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	281.829.000	277.883.000,00	98,60	14.940.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	18.870.000	18.308.000,00	97,02	0,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	18.870.000	18.308.000,00	97,02	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	245.804.000	223.367.000,00	90,87	11.210.100,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	245.804.000	223.367.000,00	90,87	11.210.100,00
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	245.804.000	223.367.000,00	90,87	11.210.100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	588.600.000	542.330.000,00	92,14	19.925.900,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	588.600.000	542.330.000,00	92,14	19.925.900,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	588.600.000	542.330.000,00	92,14	19.925.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.059.874.085	1.830.093.800,00	88,84	730.818.250,00
	JUMLAH BELANJA	12.652.709.687	11.201.443.192,00	88,53	16.316.994.197,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.752.709.687)	(9.495.381.442,00)	88,31	(14.571.564.197,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Tanah Laut, 22 Januari
2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Perdagangan

Drs. H. SYAHRIAN NURDIN,
M.Si
NIP. 196411121985031015

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SKPD : 2-17.3-30.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
Unit Organisasi : 2-17.3-30.0-00.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2-17.3-30.0-00.01.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
08	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN	1.706.061.750,00	2.063.746.500,00	(357.684.750,00)	-17,33
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.706.061.750,00	2.063.746.500,00	(357.684.750,00)	-17,33
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1.706.061.750,00	2.063.746.500,00	(357.684.750,00)	-17,33
09	BEBAN	9.168.093.448,00	16.890.790.136,00	(7.722.696.688,00)	-45,72
09.01.00	Beban Pegawai	4.201.393.953,00	4.254.841.411,00	(53.447.458,00)	-1,26
09.02.00	Beban Persediaan	666.211.181,00	609.779.790,00	56.431.391,00	9,25
09.03.00	Beban Jasa	3.129.629.947,00	3.047.240.556,00	82.389.391,00	2,70
09.04.00	Beban Pemeliharaan	267.273.270,00	168.248.660,00	99.024.610,00	58,86
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	903.585.097,00	673.753.218,00	229.831.879,00	34,11
09.08.00	Beban Hibah	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	-100,00
09.09.00	Beban Bantuan Sosial	0,00	6.282.900.000,00	(6.282.900.000,00)	-100,00
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	0,00	71.696.945,00	(71.696.945,00)	-100,00
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.282.329.556,00	(1.282.329.556,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(7.462.031.698,00)	(14.827.043.636,00)	7.365.011.938,00	0
10.04.00	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	1.578.939.422,00	(1.578.939.422,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(1.578.939.422,00)	1.578.939.422,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.462.031.698,00)	(16.405.983.058,00)	8.943.951.360,00	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.462.031.698,00)	(16.405.983.058,00)	8.943.951.360,00	0



Pelaihari, 24 Januari 2024
KEPALA DINAS

Drs. H. Syahrin Nurdin, M.Si
NIP. 196411121985031015





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-17.3-30.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
Unit : 2-17.3-30.0-00.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
Sub Unit : 2-17.3-30.0-00.01.000.0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	38.249.755.352,83	39.735.860.697,83
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.462.031.698,00)	(16.405.983.058,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	2.217.308.493,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.304.872.870,00	14.528.591.997,00
EKUITAS AKHIR	40.092.596.524,83	40.075.778.129,83

Pelaihari, 24 Januari 2024
KEPALA DINAS

Drs. H. Syahrian Nurdin, M.Si
NIP. 196411121985031015

